

## PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KEBIJAKAN DESA, KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Loura Emylia  
Emilloura512@gmail.com  
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the effect of management accountability of village funds allocation, policy, and institution on the society wealth. while, the research was a case study of Canggu, Mojokerto. Moreover, there were four variables namely, management accountability of village funds allocation ( $X_1$ ), Village policy ( $X_2$ ), and society wealth ( $X_3$ ) with its wealth as the independent variable. The instrument used questionnaires. furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was collected based on criteria given. In line with, there were 97 samples from Canggu village society. The research result concluded the management accountability of village funds allocation had positive effect on the society wealth.. furthermore, the village policy had positive effect on the society wealth as there were annual regular activities which had been done by each departments within the village. in brief, the management accountability of village funds allocation, policy, and its institution had positive effect on the society wealth.*

*Keywords: Accountability, village policy, Institution, Society Wealth.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus desa Canggu kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa, dan Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dengan bantuan SPSS versi 16. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 97 orang dari masyarakat desa Canggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kelembagaan desa menunjukkan pengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan pada tiap tahunnya dari masing-masing lembaga yang ada di desa Canggu. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: akuntabilitas, kebijakan desa, kelembagaan desa, kesejahteraan masyarakat.

### PENDAHULUAN

Strategi dalam rangka kesejahteraan pembangunan di Indonesia adalah dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua Penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal di daerah pedesaan karena di pedesaan mempunyai jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan sebagai bantuan stimulan untuk mendorong sebagian program pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan, kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan pembangunan infrastruktur pedesaan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses kelancaran pembiayaan pelaksanaan dalam setiap desa yaitu adanya penerimaan alokasi Dana desa (ADD). Selain itu, terdapat Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, Kucuran dana tersebut tidak melewati perantara namun langsung sampai kepada desa dengan jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Pada saat penerimaan Dana desa tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Penggunaan alokasi Dana desa juga harus memberikan manfaat dan hasil yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan desa harus mengedepankan kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan guna untuk mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi. Maka program yang telah di buat untuk masyarakat desa yang dibiayai oleh desa harus dipastikan mengikut sertakan pihak masyarakat desa mulai perencanaan hingga, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan program desa yang harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat serta aparat pemerintah berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya program desa. Alokasi dana desa harus dipergunakan dan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan pemerintah dan ketentuan yang berlaku dan telah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2013 pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu pengaturan desa yaitu membentuk pemerintahan desa yang profesional, Terbuka, Jujur, Efisien dan Efektif serta bertanggung jawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, Kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan Pemda Provinsi dan kabupaten/kota. Namun masih sampai saat ini ditemukan adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan aparat terpercaya untuk mengelola keuangan desa. Dalam hal ini diharapkan kepada aparat pemerintah desa beserta badan pengawas desa untuk meningkatkan kinerjanya serta masyarakat yang harus ikut berpartisipasi guna mengawasi penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat supaya penerapan dalam pembangunan desa berjalan dengan baik dan pencapaian tujuan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Disinilah masyarakat juga dituntut untuk melakukan pengawasan langsung serta aparat pemerintah kabupaten sebagai pihak pemberi dana untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana ini.

Dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran hingga realisasi melibatkan banyak pihak masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari alokasi dana desa merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya manusia yang ada dan minimnya Kontrol dari pemerintah dan pihak masyarakat yang kurang peduli. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peran dari alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud dalam membantu program kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul " Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Canggung Kecamatan Jetis Kab Mojokerto"

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa di kabupaten Mojokerto. Alokasi dana desa diatur dalam bagian II pelaksanaan, seperti yang dijelaskan bahwa alokasi dana desa yakni wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi.

Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu program yang dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat baik dalam segi bidang kesehatan, pembangunan, layanan fasilitas kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa pada setiap kabupaten di Indonesia khususnya di desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Program ini juga sepenuhnya telah ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan tentunya masyarakat serta diharapkan alokasi dana desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan pedesaan secara bergotong royong.

Penelitian ini juga memiliki tujuan yang mengacu pada masalah-masalah di atas sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap Kesejahteraan masyarakat; (2) Untuk menguji pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) Untuk menguji pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis (Sari, 2016) *Stewardship Theory* diperkenalkan sebagai teori yang didasari tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*mode of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang mempunyai peran penting bagi sebuah pencapaian tujuan.

Penelitian ini didasarkan pada *Stewardship Theory*. Teori *Stewardship* merupakan gambaran situasi dimana para manajer lebih pada kepentingan organisasi tidak fokus pada tujuan individual. Kemunculan *Stewardship Theory* bersama dengan perkembangan akuntansi, dimana *Stewardship Theory* mempunyai dasar teori psikologi dan sosiologis yang mengarah pada sikap melayani (*Steward*) dan dasar teori telah dirancang para eksekutif sebagai *Steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal mereka yaitu masyarakat (Sugista, 2017). Perilaku *Steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *Steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Selain itu pemerintah melakukan segala perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Maksud dari tujuan masyarakat disini adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan para *Steward* guna kepentingan sasaran organisasi pemerintahan, pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada principal dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya merupakan teori *Stewardship* yang didesain bagi para peneliti.

### **ALOKASI DANA DESA**

Alokasi dana desa direvisi dari dana umum (DAU) dengan beberapa proposi tambahan. Sumber alokasi dana desa berasal dari APBN 25% atau yang dikenal dengan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah disebut dana alokasi umum (DAU). Dari dana alokasi umum (DAU) pemerintah kabupaten kemudian memberikan kepada wilayah desa sebesar 10% yang disebut alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yaitu

memberikan wewenang kepada kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Alokasi dana desa mengacu pada indikator pada peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan keuangan desa harus dikelola dengan baik dan tepat berdasarkan asas sebagai berikut (1) Akuntabilitas; (2) Transparansi; (3) Partisipatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII tentang keuangan dan aset desa pasal 72 yakni sumber pendapatan desa terdiri dari (1) Pendapatan asli Daerah yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat serta lain-lain pendapatan asli desa; (2) Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara; (3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah; (5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; (6) Dana hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; (7) Lain pendapatan desa yang sah.

Adapun asas pengelolaan alokasi dana desa menurut Permendagri Nomor 37/2007 Pasal 20 yaitu (1) Asas merata merupakan besarnya bagian alokasi Dana desa sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM); (2) Asas adil merupakan besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP) Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan asas adil dari jumlah ADD yaitu besarnya 60% ADDM dan besarnya ADDP 40%.

Penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan kepada masyarakat desa. Adapun tujuan alokasi Dana desa sebagai berikut (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; (2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, lapangan kerja bagi masyarakat desa; (3) Meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; (4) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa); (5) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai budaya dalam rangka peningkatan sosial.

## **AKUNTABILITAS**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dicapai dan mengarah pada kewajiban setiap individu, kelompok institusi untuk memenuhi tanggungjawabnya melayani rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*), Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability result oriented*), akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*), akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*), akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*). Dengan demikian kegiatan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengelolaan kegiatan pertanggungjawaban harus dari awal sampai akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang dapat berbentuk laporan yang menunjukkan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian tujuan merupakan alat ukur kinerja dari individu maupun organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik suatu

organisasi dalam program kerja tahunan yang tetap berpedoman pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip transparansi (keterbukaan), transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip *value for money* prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis yaitu pemeliharaan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan demi kepentingan masyarakat.

## PELAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Dura, 2016). Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) melalui PP No. 24 tahun 2005 merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Entitas pelaporan merupakan suatu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mempertanggungjawabkan sebuah laporan keuangan yang bertujuan umum. Adapun entitas pelaporan terdiri dari (1) Pemerintah Pusat; (2) Pemerintah Daerah; (3) Satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut undang-undang satuan organisasi itu wajib menyajikan laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan entitas pelaporan yang secara peraturan perundang-undangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Disamping Pelaporan Keuangan pokok entitas pelaporan diperbolehkan untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas dan laporan kinerja keuangan. Untuk informasi keuangan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu merupakan salah satu tujuan pelaporan keuangan disusun. Adapun tujuan laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Di dalam peranan pelaporan keuangan pemerintahan entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan dalam satu periode secara sistematis dan terstruktur sebagai berikut (1) Akuntabilitas, sebagai pertanggungjawaban pengelolaan, kebajikan sumber daya dalam mencapai sebuah tujuan; (2) Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, pengelolaan serta pengendalian; (3) Transparansi, sebagai informasi keuangan yang terbuka, jujur, akurat dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Keseimbangan antargenerasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah direncanakan.

### **KEBIJAKAN DESA**

Kebijakan Desa Merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang. Meskipun wilayah administrasi desa itu sendiri yang dijangkau berskala kecil. Secara undang- Undang, kebijakan formal di level tertua dalam bentuk peraturan desa dan secara struktur undang-undang dan Ketatanegaraan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tersebut berlaku pada wilayah desa tertentu, Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat pun juga berhak memberikan masukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka penyiapan program rancangan peraturan desa.

### **KELEMBAGAAN DESA**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang desa, “ Kelembagaan desa” yaitu Pemerintah desa yang terdiri dari badan pemusyawaratan desa yang diartikan sebagai organisasi yang merupakan wakil dari penduduk desa atas wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Badan pemusyawaratan desa membahas dan menyepakati peraturan dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, memperkuat rasa kebersamaan, serta meningkatkan ikut serta masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

### **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 tentang pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah yang harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan untuk kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pemerintah telah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah dengan pemberian alokasi dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat memberikan bantuan untuk pembangunan desa berupa alokasi dana desa (ADD) diharapkan mampu membiayai pembangunan desa agar mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang diinginkan.

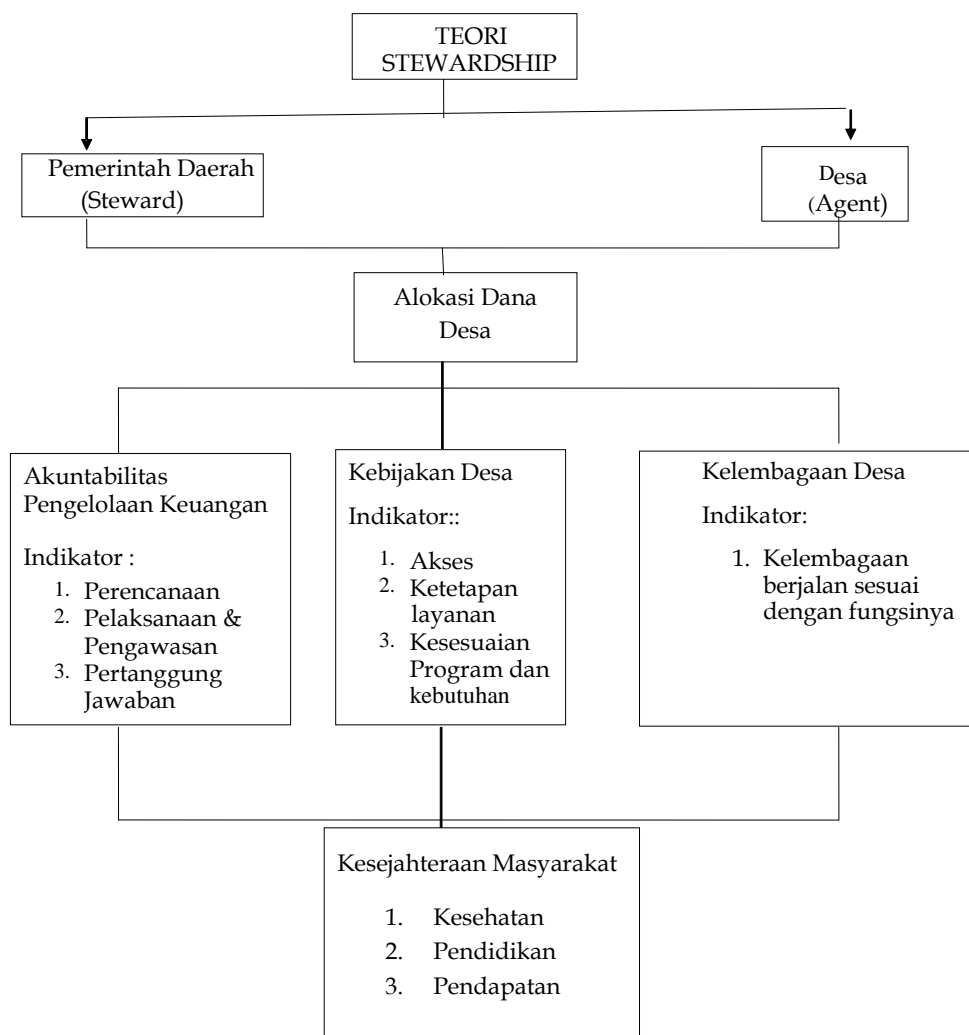
Menurut Sari (2018), Indikator Kesejahteraan masyarakat dari Badan Statistik Nasional 2006 yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perekonomian.

### **LANGKAH-LANGKAH MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Untuk Mencapai kesejahteraan tidaklah mudah, dibutuhkan program program yang yang tepat sasaran dalam menjalankannya salah satunya adalah program ADD. Program ADD adalah program yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan dititik beratkan pada pencapaian tujuan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

Berikut langkah yang ditempuh dalam mencapai kesejahteraan antara lain (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (3) Kelembagaan sistem pembangunan partisipasif; (4) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.

### **Rerangka Konseptual**



**PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Canggung**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Komang et al (2014)* bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang baik akan membuat masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan desa Canggung, kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan desa dalam mengelola keuangan dapat menghilangkan rasa curiga serta menyelesaikan permasalahan yang ada didalam pengelolaan keuangan dan mendorong kinerja pemerintah lebih baik dari sebelumnya sehingga akan memberikan rasa kenyamanan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah mengelola berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Pemerintah pusat mengharapkan laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan kegiatan yang telah dibiayai. Menurut *Muslimin et al (2012)* menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik yang mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Canggung

### **Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cunggu**

Kebijakan Pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Chasanah (2017) menunjukkan bahwa dalam penyusunan kegiatan pembangunan desa selalu mengacu pada RKP Desa dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Dusun, Dan Desa

H2: Kebijakan Desa Berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cunggu

### **Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cunggu**

Kurniawati (2017) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel kelembagaan desa tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di distrik Sentani Kabupaten Jayapura, hal tersebut terbukti dengan pelaksanaan kegiatan yang tiap tahunnya dilakukan secara berulang-ulang seharusnya dapat mengadakan kegiatan baru yang lebih penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat meski dengan dana yang minim.

H3: Kelembagaan Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cunggu

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, berdasarkan karakteristik masalahnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kasual komparatif (*Casual-Comparative Research*). Metode ini digunakan untuk mengetahui atau menguji hubungan sebab akibat yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (APKD), Kebijakan Desa(KD), dan Kelembagaan Desa(KLD) terhadap variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi adalah kesejahteraan masyarakat(KS). Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di desa Cunggu Kecamatan Jetis Kab Mojokerto. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data ,informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Peneliti telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi sampel dari penelitian ini, sebagai berikut (1) Penduduk yang bertempat tinggal di desa Cunggu kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto; (2) Pendidikan terakhir minimal SMA; (3) Memiliki profesi atau pekerjaan tetap yang terdiri dari PNS, pedagang, petani karyawan, wirausaha, dokter, TNI, Polisi, pengrajin dan lain-lain.

### **Variabel Dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Independen (Bebas)**

Variabel Independen (Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Dalam Penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Sari (2018) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa memiliki indikator sebagai berikut: (1) Perencanaan adalah adanya suatu laporan mengenai rincian dana penggunaan keuangan desa kepada masyarakat; (2) Pelaksanaan Dan Pengawasan adalah adanya suatu tindakan pengawasan tim pelaksana terhadap penggunaan keuangan desa; (3) Tanggung Jawab adalah adanya suatu laporan akhir pertanggung jawaban oleh tim pelaksana



mengenai pengembangan pelaksanaan masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan keuangan desa.

### **Kebijakan Desa**

Kebijakan merupakan pedoman dan ketentuan yang dipilih dan dianut untuk melaksanakan suatu program untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kebijakan desa merupakan produk hukum karena pada setiap pemerintah secara hukum masing-masing memiliki wewenang meskipun dengan berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini sudah tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa sendiri merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi namun bukan untuk menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan dari pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian, Setiap desa memiliki hak dan wewenang yang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum.

### **Kelembagaan Desa**

Kelembagaan desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta badan kemasyarakatan desa. Badan permusyawaratan desa merupakan yang menyelenggarakan pemerintahan yang anggotanya adalah masyarakat berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang No. 6 Tahun 2004).

### **Variabel Dependen**

Menurut Dura (2016), kesejahteraan masyarakat (KS), memiliki indikator sebagai berikut: (1) Kesehatan meliputi masyarakat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat, kemudahan Pelayanan kesehatan bagi bayi balita, adanya pemenuhan kebutuhan vitamin, imunisasi, gizi seimbang bagi balita di posyandu desa; (2) Pendidikan meliputi meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pembinaan bina keluarga balita, tidak ada angka buta huruf; (3) Pendapatan Ekonomi meliputi adanya lapangan kerja di desa Canggung.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Teknik Penentuan Skor**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primernya dengan melakukan pembagian kuesioner kepada responden yang telah dipilih oleh peneliti dan yang sesuai kriteria yang telah ditentukan. Responden akan diberikan pilihan jawaban yang tersedia didalam kuesioner yang telah diberikan skor dalam tiap pilihannya. Agar data yang diperoleh dapat diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif, maka jawaban responden dalam kuesioner biasanya menggunakan skala likert dengan menggunakan tingkat prefensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut, Skala likert dimana: Sangat Tidak Setuju (STS)= Skor 1; Tidak Setuju (TS)= Skor 2; Ragu- Ragu (RR)= Skor 3; Setuju (S)= Skor 4; Sangat Setuju (SS)= Skor 5. Selanjutnya untuk memberikan deskripsi data tersebut masing-masing variabel dibuat kategori dalam lembar kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti (Ghozali, 2016)

### **Model Regresi Berganda**

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (APKD), Kebijakan Desa (KD) dan Kelembagaan Desa (KLD) yang diprediksi dan mempengaruhi variabel dependennya yaitu kesejahteraan masyarakat. Persamaan regresi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$KS = a + \beta_1 APKD + \beta_2 KD + \beta_3 KLD + e$$

Keterangan :

KS	= Kesejahteraan Masyarakat
a	= Konstanta
$\beta$ 1, 2, 3	= Koefisien Regresi dari variabel independen
APKD	= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa
KD	= Kebijakan Desa
KLD	= Kelembagaan Desa
e	= Error Term

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji asumsi normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-Smirnov dan juga dengan menggunakan uji Normal P-P Plot. Agar lebih handal dapat dengan metode melihat normal probability plot dalam membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Pada distribusi normal akan membentuk garis lurus sedangkan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika data residual normal maka akan mengikuti garis diagonalnya.

### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, jika variabel bebas saling berhubungan maka variabel –variabel ini tidak orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Multikolinieritas akan dilihat dari VIF( Variance Inflation Factor), jika nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi dan jika dengan nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau samadengan nilai VIF  $\leq 10$  untuk menunjukkan multikolinieritasnya terhadap data yang di uji.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian Ghazali (2016) menjelaskan bahwa Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam riset ini akan menggunakan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu dengan ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu dalam grafik yang terjadi antara sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X yang telah distudentized. Dalam penelitian ini juga menggunakan glejser untuk memperkuat hasil penelitian dengan asumsi  $\alpha > 0,005$  maka dapat dinyatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

#### Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016) bahwa Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang mampu diukur oleh kuisioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan r table dengan *degree of freedom* (df) = n-2 dalam jumlah sampel yang dapat dilihat pada kolom *correlated item – total Correlation*.

Untuk menguji apakah masing-masing indikator tersebut valid atau tidak dapat dilihat dari tampilan *output cronbach alpha* yaitu pada kolom *correlation item – total correlation*. Jika r

hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka indikator tersebut dikatakan valid, dan apabila r hitung lebih kecil dari r tabel dan bernilai negatif maka tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Menurut Uji Reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *Cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk dikatakan *reliable* jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,7 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7.

### Uji Kelayakan Model

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika  $F_{hitung} < F_{Tabel}$ , maka  $H_0$  diterima atau variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan jika  $F_{hitung} > F_{Tabel}$ , Maka  $H_1$  diterima. Probability sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun ketentuannya adalah jika  $sig > \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak dan jika  $sig < \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.

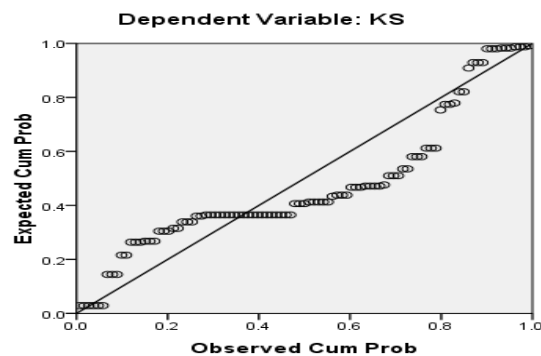
### Uji Hipotesis

Uji T dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Nilai t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Dalam penelitian digunakan signifikansi 5% untuk nilai t. Adapun pengujian hipotesisnya adalah jika  $P\ Value < 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan jika  $P\ value > 0,005$  maka  $H_1$  ditolak.

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Data berdistribusi normal, jika penyebaran plot berada disepanjang garis 45°. Hasil normalitas adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45°, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 12  
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerane	VIF	
Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa	0,501	1,996	Non Multikolinieritas
Kebijakan desa	0,612	1,633	Non Multikolinieritas
Kelembagaan desa	0,567	1,675	Non Multikolinieritas

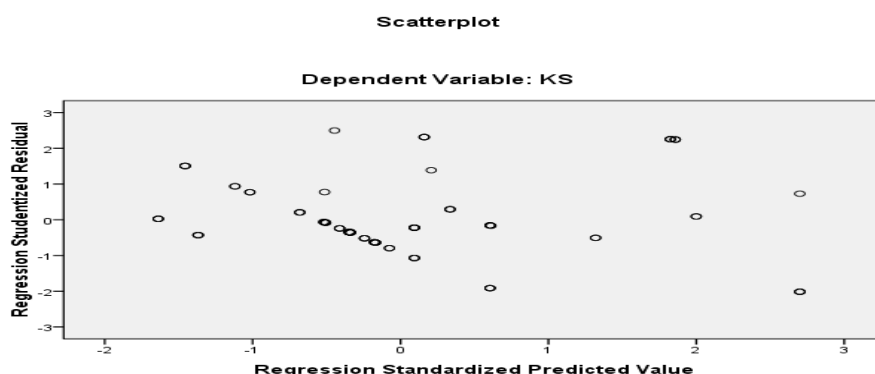
Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan tabel 11 di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas. Dan jika variance berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Gambar Scatterplot**  
**Sumber: Kuesioner (diolah), 2019**

Berdasarkan gambar 2 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Perhitungan regresi linier berganda antara akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan dibantu program SPSS 16 dalam proses perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Uji Regresi Berganda**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Model	(Constant)	.745	.244		3.050	.003
1	APKD	.361	.063	.436	5.758	.000
	KD	.229	.045	.348	5.080	.000
	KLD	.238	.076	.219	3.154	.002

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

$$KS = 0,745 + 0,361APKD + 0,229KD + 0,238KLD + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa (1)  $\beta_1$  (nilai koefisien regresi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa) bernilai positif, mempunyai arti apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa semakin meningkat, maka kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan semakin meningkat;

(2)  $\beta_2$  (nilai koefisien regresi kebijakan desa) bernilai positif, mempunyai arti apabila kebijakan desa semakin meningkat, maka kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan semakin meningkat; (3)  $\beta_3$  (nilai koefisien regresi kelembagaan desa) bernilai positif, mempunyai arti apabila kelembagaan desasemakin meningkat, maka kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan semakin meningkat.

## Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 13**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi & Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856a	.733	.725	.16662

a. Predictors: (Constant), KLD, KD, APKD

b. Dependent Variable: KS

**Sumber: Kuesioner (diolah), 2019**

Tabel 13 menunjukkan nilai R sebesar 0,856. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah kuat karena  $> 0,50$ . Nilai *R Square* sebesar 0,733 atau 73,3%, ini menunjukkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat yang dapat dijelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dankelembagaan desa adalah sebesar 73,3%, sedangkan sisanya 26,7% (1-0,733) dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

### 2. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dankelembagaan desaberpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 14.

**Tabel 14**  
Hasil Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.102	3	2.367	85.270	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.582	93	.028		
	Total	9.683	96			

a. Predictors: (Constant), KLD, KD, APKD

b. Dependent Variable: KS

**Sumber: Kuesioner (diolah), 2019**

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 85,270. Berdasarkan tingkat signifikansinya, maka disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desamempunyai pengaruh

signifikan terhadap variabel dependennya yaitu kesejahteraan masyarakat (Y). Sehingga model telah fit.

### 3. Uji Hipotesis

**Tabel 15**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	T	Sig.
APKD	5.758	.000
KD	5.080	.000
KLD	3.154	.002

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada tabel 15, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa (1) Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap Kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 15, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa adalah  $\alpha=0,000 < 0,05$  menandakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga  $H_1$  yang menyatakan dugaan adanya pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat diterima; (2) Pengaruh Kebijakan desa terhadap Kesejahteraan masyarakat. Hasil perhitungan tabel 5, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk kebijakan desa adalah  $\alpha=0,000 < 0,05$  menandakan bahwa kebijakan desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga  $H_2$  yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat diterima; (3) Pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil perhitungan tabel 5, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk kelembagaan desa adalah  $\alpha=0,002 < 0,05$  menandakan bahwa kelembagaan desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga  $H_3$  yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat diterima.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kesimpulan Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Canggu, dalam hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut didapatkan dari data responden yang bahwa penyajian laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa telah sesuai serta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dipublikasikan dalam bentuk banner yang di pasang di depan kantor kelurahan Desa canggu.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Komang, *et al* (2017), Muslimin *et al*(2012), Wardhana (2016) yang mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik serta akuntabel dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan dari alokasi dana desa (ADD) dibagi menjadi 30% untuk belanja aparatur daerah dan operasional dengan perincian yaitu operasional pemerintah daerah 50%, operasional BPD 25% dan tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah desa sebesar 25% dari belanja pemerintah desa. Sedangkan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dari total keseluruhan ADD dengan perincian belanja modal sebesar 70%, pemberdayaan masyarakat 30% (biaya perbaikan sarana prasarana, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan sosial budaya).

### **Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa Kebijakan desa mempunyai tingkat signifikansi terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adanya pengaruh positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat memberikan kepuasan tersendiri bagi sebagian masyarakat dan semakin banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mempermudah perekonomian maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu kebijakan desa dapat tersusun perencanaan kegiatan dengan tujuan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya kebijakan ini telah disepakati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya tekanan dari pemerintah desa setempat.

Kebijakan desa didasarkan pada berbagai permasalahan yang telah dihadapi masyarakat dalam pembangunan desa guna meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga diharapkan prioritas kebijakan atau program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif terutama upaya dalam meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, jalan, dan lain-lain. Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sengaji (2018) bahwa kebijakan desa yang baik yang telah dilakukan sesuai dengan sasaran yang diperlukan oleh masyarakat sekitar.

### **Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kelembagaan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kelembagaan desa pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya pengaruh positif antara kelembagaan desa dengan kesejahteraan memberikan kemudahan dalam penyediaan kegiatan masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan fasilitas masyarakat dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan desa merupakan variabel yang berpengaruh paling kecil terhadap kesejahteraan masyarakat desa canggung karena masyarakat berpendapat bahwa kelembagaan desa belum mampu menjalankan sesuai dengan fungsinya dan cenderung kurang melakukan interaksi terhadap masyarakat. Adapun kelembagaan desa di pedesaan antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lain-lain.

## **SIMPULAN DAN SARAN**



## Simpulan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Canggung Kecamatan Jetis Mojokerto dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai sampel penelitian dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai penelitian untuk memperoleh sampel. Telah didapatkan sampel total sebesar 97 orang dengan 70 responden berjenis kelamin laki-laki dan 27 responden berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan nilai signifikansi untuk variabel tersebut  $< 0,05$  yaitu sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (APKD) di desa canggung dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan secara rinci; (2) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel kebijakan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan nilai signifikansi untuk variabel tersebut  $< 0,05$  yaitu sebesar 0,008; (3) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel kelembagaan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan nilai signifikansi untuk variabel tersebut  $< 0,02$ .

## Saran

Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya pertumbuhan daerah, motivasi dan lain-lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat terdapat pengaruh sebesar 26,7% dari variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini; (2) Dari penelitian dapat diketahui bahwa Kelembagaan desa merupakan variabel yang berpengaruh paling kecil terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pihak desa harus memperbaiki kelembagaan desa agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dura, J.2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka* volume 10 Nomor 1 Agustus 2016:26-32.
- Febriana, Ayu.2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Skripsi*. STIESIA
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Aplikasi SPSS. Edisi Kelima Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komang. A., A. Tungga A Dan M. Pradana.2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No.1)*
- Kurniawati, Y. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung , Kebijakan Kampung, dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Volume 12 Nomor 2 November 2017:77-87.
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol 07 No2 Juli. Hal 143-152
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta

- Muslimin, Mappamiring dan Nurmaeta.2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas Jurnal ilmu Pemerintahan* Vol II No.1
- Nafidah, Lina.2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*,Vol 3 No 1 Juni Hal 214-239
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 TentangStandar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sistem & Proses dan pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Mojokerto
- Sari, A. N. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STIESIA). Surabaya.
- Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Sugista, R. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Sugiyono,2013. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tahir, Erni.2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningktan kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Umami,R., Idang dan Nurodin.2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dea. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* ISSN 20886969 Vol. 6 Hal 11.
- Undang- Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Pmerintah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa  
\_\_\_\_\_, Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Desa.
- , No. 6 Tahun 2013 pasal 4 tentang Pengaturan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 4 Tentang Peraturan Desa
- Wardana, I. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Semarang. Semarang